

# FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik)

**Nastabela Erma Vionita**

*nastabelaermavionita@yahoo.com*

**Sugeng Praptoyo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

## ABSTRACT

*This research is meant to test the influence of human resources competency, the utilization of information technology, the implementation of government accounting standard, and the internal control system to the financial statement quality of the local government. The research is the comparative causal research. The samples are 15 local government work departments which is located in Gresik district. The sample collection technique has been done by using purposive sampling and the respondents are 65 people. The data has been done by using primary data which has been obtained by issuing questionnaires which are directly distributed to the respondents which include the head and staff of accounting / financial administration on the Local government work department which is located in the Local Government of Gresik District. The result of this research shows that the human resources has significant and positive influence to the financial statement quality of the local government, the implementation of government accounting standard have significant and positive influence to the financial statement quality of the local government and the internal control system has significant and positive influence to the financial statement quality of the local government. Meanwhile, the utilization of information technology does not have any significant influence to the financial statement quality of the local government.*

**Keywords:** *Quality, the financial statement quality of local government, HR Competency, Information Technology, SAP Implementation, Internal Control System.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kausal komparatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Pemerintahan Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 65 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden yang meliputi kepala dan staf bagian akuntansi / penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Pemerintahan Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** *kualitas, laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi SDM, teknologi informasi, penerapan SAP, sistem pengendalian intern.*

## PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) semakin meningkat yang mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah

untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Dengan adanya era reformasi dalam perkembangan akuntansi sektor publik yang terjadi di Indonesia, maka akan diberlakukan otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang telah di revisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan menetapkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara karena merupakan kewajiban pemerintah dalam mengaplikasikan sebuah pertanggungjawaban keuangan daerah yang terkait dengan reformasi regulasi keuangan Negara. Dalam UU No. 17 Tahun 2003 khususnya pada pasal 31, disebutkan bahwa Gubernur / Bupati / Wali Kota yang merupakan pemerintah daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada kenyataannya kualitas laporan keuangan pemerintah ternyata masih sangat rendah, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Rendahnya kualitas laporan keuangan tersebut disebabkan oleh aparat pemerintah yang resisten terhadap reformasi pengelolaan keuangan negara. Mental korup juga masih kuat di pemerintahan. Kemampuan pemerintah dalam menyusun dan melaporkan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan juga masih terbatas. Hal ini sebagian disebabkan oleh tidak memadainya SDM yang menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang berupa opini, merupakan cerminan bagi kualitas pengelolaan dan penyajian secara wajar atas suatu laporan keuangan. yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik karena laporan keuangan merupakan tanggung jawab suatu entitas.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan

Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan adanya faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakannya di masa yang akan datang.

## TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam organisasi sektor publik yang menyangkut praktek pelaporan keuangan merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai *principal*, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Menurut (Faristina, R. 2011) menyatakan pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai *principal*. Berdasarkan *agency theory*, karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari *principal* kepada *agent*, karena hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas yang mengandalkan pada kontrak sebagai acuan perilaku partisipan. Kontrak dapat bersumber dari kebiasaan, kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama, dan ikatan hukum formal. Dari sisi aturan formal, entitas pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada seperangkat aturan yang menspesifikasikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap partisipan (Jensen dan Meckling, 1976).

### Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang didasari oleh ketrampilan, pengetahuan, dan sikap sehingga dapat mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting karena sumber daya manusia merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. (Wiley 2002, dalam Azhar 2007) mendefinisikan bahwa "Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut". Menurut Kharis 2010, menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

### Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan seseorang dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, handal, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet, electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan

pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, dan data yang disimpan mudah rusak.

### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn 2011, dalam Adhi dan Suhardjo 2013).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antargenerasi. Melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan dapat disusun laporan keuangan yang berguna dan bermakna. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur atas dasar kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, menyediakan informasi laporan keuangan yang andal, pengamanan asset Negara, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: (1) penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan, (2) pembagian tugas, (3) pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, (4) keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan, (5) pengecekan independen terhadap kinerja.

## **Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat diwujudkan apabila dalam menyajikan informasi laporan keuangannya mudah dipahami dan dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Tetapi, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kualitas laporan keuangan tersebut dapat di lihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yaitu: (1) relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu, (2) andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, (3) dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, (4) dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## **Pemerintah Daerah**

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sumber Daya Manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan

layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011). Darwanis dan Mahyani (2009) menyatakan apabila setiap SKPD melakukan pelatihan yang berhubungan dengan keuangan pemerintah bagi pegawai bagian keuangan, dengan tujuan untuk menambah wawasan sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja instansi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Adanya teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan / ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Menurut (Jogiyanto, 1995 dalam Harifan 2009) menjelaskan bahwa informasi yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi. Nurlaila (2014) membuktikan dalam penelitian bahwa efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Semakin baik atau besar, maka semakin berkualitas pula laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai yang diharapkan memerlukan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan/pertanggung jawaban laporan keuangan pemerintah dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam

pengecahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel. Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Dalam penelitiannya mengenai nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan survei terhadap kepala dan staf bagian akuntansi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengendalian intern akuntansi telah memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang tercermin dari keandalan nilai informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka yang dipusatkan pada pengujian hipotesis. Target populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Gresik. Kriteria yang digunakan untuk memilih responden adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, yang meliputi kepala dan staf bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Alasan dipilihnya kepala dan staf bagian akuntansi/penatausahaan keuangan sebagai kriteria sampel dalam penelitian ini karena merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Variabel Independen**

##### ***Kompetensi Sumber Daya Manusia***

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Pengukuran variabel kompetensi sumber daya manusia didalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan model skala likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

##### ***Pemanfaatan Teknologi Informasi***

Teknologi Informasi (TI) dapat didefinisikan sebagai teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), menampilkan (*represent*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009 dalam Zuliarti 2012). Pengukuran variabel pemanfaatan teknologi informasi didalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan model skala likert lima poin. Responden diminta

untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

### ***Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan***

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Pengukuran variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan didalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan model skala likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

### ***Sistem Pengendalian Intern***

Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, untuk menghindari dari kecurangan manipulasi angka-angka yang dapat merugikan masyarakat dan Negara, serta memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Pengukuran variabel sistem pengendalian intern didalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan model skala likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

### **Variabel Dependen**

#### ***Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pengukuran variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan model skala likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* / handal jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronboach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2006:41).

#### **Uji Validitas**

Kesahihan (*validity*) merupakan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur atau dengan kata lain alat ukur tersebut dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu perlu sebab pemrosesan data yang tidak sah akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar. Validitas item-item pertanyaan kuesioner dapat diukur dengan melakukan korelasi antara skor item pertanyaan dengan total skor variabel



atau konstruk. Bila korelasi antara masing-masing butir terhadap total skor tersebut signifikan maka data tersebut dinyatakan valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* (df) = jumlah konstruk -2. Jika  $r_{hitung}$  (untuk r tiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item - total correlation*) >  $r_{tabel}$  dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2006:45).

### Analisis Statistik Deskriptif

Ghozali (2006:19) menyatakan bahwa analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness*.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu/residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan dua cara yaitu metode pendekatan *grafik normal probability plot* dan pendekatan *kolmogorov-smirnov test* (Ghozali, 2006:110). Pendekatan *grafik normal probability plot* dapat di deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Pendekatan *kolmogorov-smirnov test* dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan jika hasilnya nilai probabilitas > 0,05 maka dikatakan data normal.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2006:105). Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah di prediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah distandarisasi.

#### Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Menurut Ghozali (2006:91) multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai cutoff yang menunjukkan nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10. Apabila nilai *tolerance* mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi.

### Pengujian Regresi Linier Berganda

Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$KLKPD = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 PTI + \beta_3 PSAP + \beta_4 SPI + \varepsilon$$

Keterangan:

KLKPD : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : Koefisien regresi dari variabel independen

KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia

PTI : Pemanfaatan Teknologi Informasi

PSAP : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

SPI : Sistem Pengendalian Intern  
 $\epsilon$  : Koefisien eror

Dalam model diatas akan digunakan pengujian kelayakan model tersebut dengan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat  $\alpha$  sebesar 5%. Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jadi jika nilai signifikan uji F < 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya, begitupun sebaliknya.

### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya digunakan mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan dependen (Ghozali, 2006:83). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.

### Uji Hipotesis (Uji T)

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistic t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:84). Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan 5%, dengan kriteria sebagai berikut: (1) apabila nilai signifikansi uji t < 0,05 maka  $H_0$  ditolak, (2) apabila nilai signifikansi uji t > 0.05 maka  $H_0$  diterima.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Reliabilitas

Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronboach Alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1  
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel Penelitian	<i>Cronboach Alpha</i>	Keterangan
1.	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,881	Reliabel
2.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,814	Reliabel
3.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,758	Reliabel
4.	Sistem Pengendalian Inten	0,811	Reliabel
5.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,854	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2015.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa semua varibel memiliki *Cronboach Alpha* di atas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa instrument kuesioner tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik karena alat ukur yang digunakan handal / reliabel.

### Uji Validitas

Kesahihan (*validity*) merupakan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur atau dengan kata lain alat ukur tersebut dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Validitas item-item pertanyaan kuesioner dapat diukur dengan melakukan korelasi antara skor item pertanyaan dengan total skor variabel atau konstruk. Bila korelasi antara masing-masing butir terhadap total skor tersebut signifikan maka data tersebut dinyatakan valid. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* (df) = jumlah konstruk -2. Jika  $r_{hitung}$  (untuk r tiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item - total correlation*) >  $r_{tabel}$  dan nilai r positif, maka butir

atau pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2006:45). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel ( $\alpha=5\%$ )	Keterangan
Kompetensi SDM1	0,401	0,256	Valid
Kompetensi SDM2	0,727	0,256	Valid
Kompetensi SDM3	0,775	0,256	Valid
Kompetensi SDM4	0,630	0,256	Valid
Kompetensi SDM5	0,777	0,256	Valid
Kompetensi SDM6	0,881	0,256	Valid
Kompetensi SDM7	0,852	0,256	Valid
Kompetensi SDM8	0,861	0,256	Valid
Pemanfaatan TI1	0,815	0,256	Valid
Pemanfaatan TI2	0,702	0,256	Valid
Pemanfaatan TI3	0,610	0,256	Valid
Pemanfaatan TI4	0,421	0,256	Valid
Pemanfaatan TI5	0,601	0,256	Valid
Pemanfaatan TI6	0,637	0,256	Valid
Pemanfaatan TI7	0,720	0,256	Valid
Pemanfaatan TI8	0,768	0,256	Valid
Penerapan SAP1	0,524	0,256	Valid
Penerapan SAP2	0,552	0,256	Valid
Penerapan SAP3	0,663	0,256	Valid
Penerapan SAP4	0,732	0,256	Valid
Penerapan SAP5	0,760	0,256	Valid
Penerapan SAP6	0,497	0,256	Valid
Penerapan SAP7	0,375	0,256	Valid
Penerapan SAP8	0,795	0,256	Valid
SPI1	0,557	0,256	Valid
SPI2	0,827	0,256	Valid
SPI3	0,839	0,256	Valid
SPI4	0,817	0,256	Valid
SPI5	0,524	0,256	Valid
SPI6	0,613	0,256	Valid
SPI7	0,541	0,256	Valid
Kualitas LKPD1	0,518	0,256	Valid
Kualitas LKPD2	0,740	0,256	Valid
Kualitas LKPD3	0,730	0,256	Valid
Kualitas LKPD4	0,681	0,256	Valid
Kualitas LKPD5	0,682	0,256	Valid
Kualitas LKPD6	0,622	0,256	Valid
Kualitas LKPD7	0,771	0,256	Valid
Kualitas LKPD8	0,561	0,256	Valid
Kualitas LKPD9	0,752	0,256	Valid
Kualitas LKPD10	0,689	0,256	Valid

Keterangan: Tabel [ $df-2 (59-2) = 57 ; \alpha = 5\% ] = 0,256$

Sumber: Data primer diolah, 2015.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel ( $r \text{ hitung} > 0,256$ ) sehingga masing masing item pertanyaan dikatakan valid.

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi SDM	59	3,13	5,00	4,1271	,48717
Pemanfaatan TI	59	3,13	5,00	4,0657	,45091
Penerapan SAP	59	3,00	5,00	4,1525	,44593
SPI	59	2,71	5,00	3,9879	,47029
Kualitas LKPD	59	2,70	5,00	4,0525	,49037
Valid N (listwise)	59				

Sumber: Data primer diolah, 2015.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) adalah sebesar 59 data yang digunakan. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai minimum sebesar 3,13 dan nilai maximum sebesar 5,00. Nilai rata-rata kompetensi sumber daya manusia sebesar 4,1271 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,48717.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 3,13 dan nilai maximum sebesar 5,00. Nilai rata-rata pemanfaatan teknologi informasi sebesar 4,0657 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,45091.

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) memiliki nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maximum sebesar 5,00. Nilai rata-rata standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebesar 4,1525 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,44593.

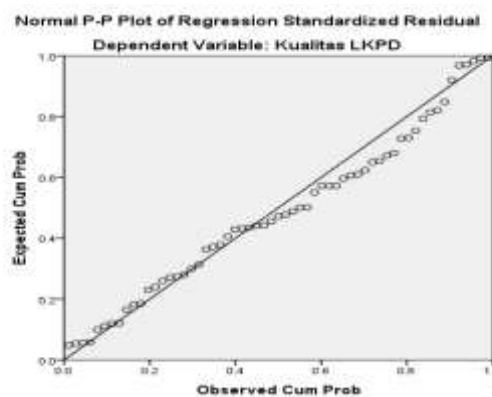
Variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai minimum sebesar 2,71 dan nilai maximum sebesar 5,00. Nilai rata-rata sistem pengendalian intern sebesar 3,9879 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,47029.

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memiliki nilai minimum sebesar 2,70 dan nilai maximum sebesar 5,00. Nilai rata-rata kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 4,0525 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,49037.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu/residual mempunyai distribusi normal atau tidak. dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu metode pendekatan *grafik normal probability plot* dan pendekatan *kolmogorov-smirnov test*. Berdasarkan hasil SPSS 20 *Normal probability plot* dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



**Gambar 1**  
**Grafik Normal P-Plot of Regression Standardized**  
Sumber: Output SPSS

Dari gambar hasil *normal probability plot* dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga dapat memenuhi uji normalitas.

Pendekatakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan jika hasilnya nilai probabilitas > 0,05 maka dikatakan data normal. Berdasarkan hasil SPSS 20 dengan menggunakan *Nonparametric Tes One-Sample Kolmogorov-Smirnov (1 Sampel K-S)* maka dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

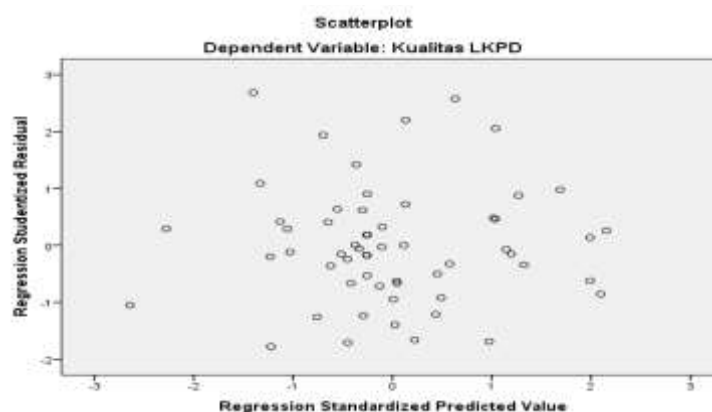
		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.27221203
	Absolute	.094
Most Extreme Differences	Positive	.094
	Negative	-.057
Kolmogorov-Smirnov Z		.721
Asymp. Sig. (2-tailed)		.676

Sumber: Data primer diolah, 2015.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,721 dengan *Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05. Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa data memiliki distribusi normal karena nilai *kolmogorov-smirnov* memiliki tingkat signifikansi 0,676 > 0,05.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya titik-titik tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**  
Sumber: Output SPSS

Dari gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti

pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau bebas dari heterokedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai cutoff yang menunjukkan nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10. Apabila nilai *tolerance* mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian multikolonieritas dengan perhitungan statistik nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

**Tabel 5**  
Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kompetensi SDM	,309	3,238
Pemanfaatan TI	,260	3,840
Penerapan SAP	,401	2,493
SPI	,580	1,725

Sumber: Data primer diolah, 2015.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kesimpulan dari pengujian ini adalah nilai VIF dari Variabel kompetensi sumber daya manusia (KSDM), pemanfaatan teknologi informasi (PTI), penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan sistem pengendalian intern (SPI) tidak lebih atau < 10. Nilai *tolerance* dari variabel kompetensi sumber daya manusia (KSDM), pemanfaatan teknologi informasi (PTI), penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan sistem pengendalian intern (SPI) tidak kurang > 0,1. Maka kesimpulan dari pengujian ini adalah tidak terjadi multikolonieritas karena model regresi ini baik.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi yang telah dijelaskan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah:

$$KLKPD = \alpha + \beta_1 KSDM - \beta_2 PTI + \beta_3 PSAP + \beta_4 SPI + \varepsilon$$

Dalam model regresi linier diatas maka akan digunakan pengujian model sebagai berikut:

#### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model dengan menunjukkan apakah semua variabel independen yang terdiri dari kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan tingkat  $\alpha$  sebesar 5%. Hasil perhitungan uji kelayakan model (Uji F) dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

**Tabel 6**  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	9,649	4	2,412	30,310	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	4,298	54	,080		
Total	13,947	58			

Sumber: Data Primer diolah, 2015.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 30,310 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7  
Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.832 <sup>a</sup>	.692	.669	.28211

Sumber: Data Primer diolah, 2015.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,669 atau 66,9%. Hal ini berarti bahwa variasi besarnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa dijelaskan oleh variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern. Sedangkan sisanya sebesar 33,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Kedua hasil uji diatas menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak dan dianggap cukup kuat dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS 20 didapat hasil uji t yang dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8  
Hasil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,017	,384		,045	,964
Kompetensi SDM	,581	,137	,577	4,247	,000
1 Pemanfaatan TI	-,239	,161	-,220	-1,483	,144
Penerapan SAP	,325	,131	,296	2,480	,016
SPI	,315	,103	,302	3,048	,004

Sumber: Data primer diolah, 2015.

Dari tabel 8 maka diperoleh model analisis regresi linier berganda yang dapat dibentuk, yaitu:

$$KLKPD = 0,017 + 0,581KSDM - 0,239PTI + 0,325PSAP + 0,315SPI + \epsilon$$

### Pembahasan

#### Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8, variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,581. Hal ini menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Hal ini mengidentifikasi bahwa apabila semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Variabel kompetensi sumber daya manusia juga menunjukkan t hitung sebesar 4,247 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, karena untuk dapat menghasilkan laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam melaksanakan sistem akuntansi. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. Hasil uji ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Roviyantje (2012) dan Wati *et al.* (2014).

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8, variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,239. Hal ini menunjukkan arah hubungan negatif (berlawanan arah) antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengidentifikasi bahwa apabila semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan diikuti dengan penurunan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Variabel pemanfaatan teknologi informasi juga menunjukkan t hitung sebesar -1,483 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,144 > 0,05$  artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak.

Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena sistem komputer tidak mudah beradaptasi jika terjadi perubahan sistem, pengimplementasian teknologi informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi membutuhkan waktu yang lama, serta biaya pemasangan instalasi yang tinggi. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tetapi belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Hasil uji ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014). Namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan E. Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010).

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8, variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,325. Hal ini menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengidentifikasi bahwa apabila semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan juga menunjukkan t hitung sebesar 2,480 dengan nilai signifikansi



sebesar  $0,016 < 0,05$  artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Jadi dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik maka pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kualitas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan terwujud pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berwibawa. Hasil uji ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhi dan Suhardjo (2013) dan Nurlaila (2014).

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8, variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,315. Hal ini menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengidentifikasi bahwa apabila semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Variabel sistem pengendalian intern juga menunjukkan  $t$  hitung sebesar 3,048 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,004 < 0,05$  artinya sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima. Hasil uji ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012) dan Udiyanti *et al.* (2014).

Sistem pengendalian intern dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan keuangan. Karena hal itulah yang menjadi faktor terbesar adanya tindakan-tindakan kurang etis dari pegawai pemerintahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jika sudah ada otorisasi pemisahan tugas yang jelas maka setiap fungsi-fungsi dapat dijalankan dengan baik. Informasi-informasi yang dilaporkan akan lebih akurat sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan-tindakan tidak etis yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012) dan Udiyanti dan Darmawan (2014).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa (1) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Untuk dapat menghasilkan

laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam melaksanakan sistem akuntansi. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan, (2) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal, (3) penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah, (4) sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas.

### Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas dapat diberikan suatu saran yang merupakan implikasi dari hasil penelitian. Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain: (1) mempertimbangkan untuk menggunakan obyek penelitian dengan memperluas area penelitian dan juga satuan kerja yang lebih luas yang diharapkan dapat memungkinkan klasifikasi yang berbeda, (2) mempertimbangkan dalam menggunakan variabel lain seperti pengawasan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K. dan Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 5 (3).
- Anggraeni, D. T. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi No 3 Vol 3*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Azhar, A. 2007. *Media Pembelajaran*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darwanis dan Mahyani. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Faristina, R. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harifan, H. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Padang. *Skripsi* Universitas Negeri Padang. Padang.
- Indriasari, D. dan E. Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.

- Jensen, M. C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*. Vol. 3 (4) : 305-360.
- Kharis, A. 2010. Pengaruh Kualitas Sumber Daya manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Avia Avian. *Skripsi*. UPN Veteran. Surabaya.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 1-17.
- Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Roviyantie, D. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
- Sukmaningrum, T. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sutaryo. 2011. Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Dengan E-Government System. <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id>. 19 Desember 2015 (19.00).
- Udiyanti, N. A. dan A. S. Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak*. Vol 2 (1). Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Wati, K. D. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *e-Journal S1 Ak No 1 Vol 2*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Widyaningrum, C. dan Rahmawati. 2010. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus). *Skripsi*. Universitas MuhMuria Kudus. Kudus.